

Tata Kelola Perusahaan Dan Pengakuan Pendapatan Prematur

Maria Theresia Irlene dan Ari Budi Kristanto

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga
Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga 50711, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Corporate governance; earning management; and Premature revenue recognition.

ISSN (print) : 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:

Maria Theresia Irlene:

Tel. /Fax. 0818821125

E-mail: mariairlene96@gmail.com



Abstract

The purpose of this research is to observe an influence between corporate governance and premature revenue recognition. There are 167 manufacturing companies listed on the IDX, then through a sample collection method using purposive sampling and 37 companies acquisition for three years. The analytical technique used is the regression of data panels with common effect models with GLS calculations. The results indicate that the number of the board of directors, the number of audit committee meetings, the financial skills of the audit committee negatively affect premature revenue recognition, and the number of the board of commissioners who are not as influential premature revenue recognition. Therefore, the recommendation for governments and companies is to create new governance standards to limit earnings management actions that are detrimental to the parties. This study also used as other empirical evidence regarding the relationship of corporate governance to the premature revenues recognition and renewing vulnerable testing time.

Citation: Irlene, M.T., dan Kristanto, A. B. (2020). Tata Kelola Perusahaan Dan Pengakuan Pendapatan Prematur. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3 (1)

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara tata kelola perusahaan dengan pengakuan pendapatan prematur. Ada 167 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, lalu melalui metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 37 perusahaan selama tiga tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model common effect dengan perhitungan GLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi, jumlah pertemuan komite audit, keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap pengakuan pendapatan prematur dan jumlah anggota dewan komisaris yang tidak berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan prematur. Hasil penelitian ini sebagai rekomendasi pemerintahan dan perusahaan dalam membuat standar tata kelola baru agar dapat membatasi tindakan-tindakan manajemen laba yang merugikan sebelah pihak. Hasil penelitian ini juga sebagai bukti empiris lainnya mengenai hubungan tata kelola perusahaan terhadap pengakuan pendapatan prematur dan memperbaharui rentan waktu pengujian.

JEL Classification: D24, G12, G30

DOI: <https://doi.org/10.26905/afre.v3i1.4293>

1. PENDAHULUAN

Perusahaan terbuka yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai Februari 2019 sudah tercatat sekitar 624 perusahaan. Semua perusahaan ini diharuskan melakukan pelaporan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal seperti calon investor, kreditur, pemegang saham,

pemerintah maupun publik. Salah satu kasus dalam pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2001 dengan melakukan penilaian laba yaitu sebesar Rp 132 miliar yang sebenarnya hanya sebesar Rp 99 miliar saja. Hal ini membuat para pemakai laporan keuangan perusahaan ini memakai informasi palsu (Faisal, 2003). Kualitas laporan keuangan yang dibuat sangat mempengaruhi pihak eksternal, laporan keuangan saat

ini telah terdistorsi adanya manajemen laba. Manajemen laba adalah upaya mengubah informasi dalam pelaporan keuangan untuk mencapai kepentingan dirinya (manajemen) sendiri yang nantinya akan mengurangi kredibilitas laporan keuangan tersebut (Nabila & Daljono, 2013; Lisandri & Hayati, 2018, Salih dkk. 2019). Manajemen laba dapat dicapai dengan beberapa pola yaitu *taking a bath* (kenaikan atau penurunan laba secara ekstrim), *income smoothing* (pemerataan laba), *income minimization* (merendahkan laba), dan *income maximization* (menaikkan laba) (Scott, 2014).

Pendapatan merupakan elemen penting dalam laporan keuangan terutama pada laporan laba rugi. Besaran laba ialah hasil selisih dari pendapatan dan beban perusahaan. Salah satu cara pola manajemen laba yang dapat dilakukan ialah dengan menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan pendapatan (pengakuan pendapatan prematur). Pengakuan pendapatan prematur adalah suatu pendapatan yang diakui lebih dulu sebelum perusahaan menjual barang tersebut atau perusahaan yang belum memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Pengakuan pendapatan yang lebih awal ini dipastikan akan berdampak pada besaran piutang dan pendapatan perusahaan tersebut (Scott, 2014). Pencatatan pendapatan yang diakui lebih awal mengakibatkan pendapatan tahun periode tersebut lebih besar daripada pendapatan yang sesungguhnya ada. Perusahaan yang melaksanakan penyajian kembali laporan keuangan biasanya melakukan manajemen laba dalam pengakuan pendapatan untuk memanipulasi pendapatan (Sun & Rath, 2009; Yang, Chun, & Ramadili, 2009; Durnev & Mangen, 2009; Mendlowitz, 2017; Kamal, Salleh, & Ahmad, 2016; dan Sakib, 2019).

Manajer melakukan manajemen laba dikarenakan tuntutan suatu perusahaan agar terlihat baik oleh pihak eksternal dan juga untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu pentingnya perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik dalam mengurangi aktivitas rekayasa manajerial yang dalam bahasan ini terkait dengan pengakuan pendapatan prematur dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. *Corporate governance* ialah beberapa prosedur dan aturan yang menjamin manajer untuk mengendalikan perusahaan agar terciptanya nilai tambah bagi *stakeholder* (Berger *et al.*, 2005; Sulistyanto, 2008; Haryanto, 2013; Wijaya, Rohman, & Zulaikha, 2018; Chou & Buchdadi, 2018; Gnawali, 2018). Menurut Wibowo (2010), Putri, Haryanto, & Firdaus, (2018), Muda, Maulana, Siregar, & Indra,

(2018) *corporate governance* lebih mengarah pada sekumpulan komponen yang diorganisasikan dan dikendalikan untuk menjalankan bisnis suatu perusahaan. Komponen *Corporate Governance* di Indonesia yaitu terdiri dari dewan direksi sebagai pengelola, dewan komisaris sebagai pengawas, pemegang saham sebagai pemegang kepemilikan dan juga orang yang memiliki kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik ini menekankan terhadap pentingnya komite audit dan komisaris independen pada setiap perusahaan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara manajer dengan pihak-pihak lainnya (Sulistyanto, 2008; Erawati & Wahyuni, 2019; Tessema, 2019; Bidabad & Allahyarifard, 2019). Dengan adanya komite audit dan komisaris independen dapat memberikan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Inggris oleh Okaily, Dixon, & Salama (2018) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *premature revenue recognition* atau pengakuan pendapatan prematur. Penelitian tersebut menggunakan jumlah *non-executive director* dan jumlah *board of directors*, tugas antara dewan komisaris & dewan direksi tidak dipisah, keahlian keuangan komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah komite audit sebagai proksi *corporate governance*. Semakin tinggi jumlah *non-executive director* dan jumlah *board of directors*, maka semakin tinggi pula *premature revenue recognition*. Sebaliknya, semakin tinggi nilai dari tugas antara dewan komisaris dan dewan direksi tidak dipisah, keahlian keuangan komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah komite audit, maka membuat pengakuan pendapatan prematur menjadi rendah. Temuan beberapa penelitian (Antonia, 2008; Indriastuti, 2012, Maulida, 2019) menyimpulkan tidak ada pengaruh (negatif tidak signifikan) dewan komisaris terhadap manajemen laba. Sedangkan temuan penelitian (Lestari & Murtanto, 2018) menunjukkan dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Terkait keahlian komite audit dengan manajemen laba, penelitian Katmon & Farooque (2015) melihat tidak ada pengaruh. Penelitian yang dilakukan Katmon & Farooque (2015); Mohd *et al.* (2007); Nabila & Daljono (2013); Prabowo (2014) menyimpulkan tidak ada pengaruh antara jumlah pertemuan komite audit dengan manajemen laba. Penelitian ini ingin mencoba menguji kembali apakah hasil penelitian yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini akan sesuai dengan hasil

penelitian sebelumnya yang dilakukan di Inggris atau justru memiliki hasil yang berbeda. Ada pula ketidakkonsistenan jika dilihat dari penelitian lain di Indonesia terkait manajemen laba. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian kali ini akan melakukan replikasi penelitian Okaily *et al.* (2018) tetapi memakai objek perusahaan yang ada di Indonesia.

Ada dua sistem dalam *corporate governance* yang dipakai oleh banyak negara pada umumnya, yakni sistem *one-tier* yang dipakai di negara-negara Amerika dan Inggris dan sistem *two-tier* yang dipakai di negara-negara pada benua Eropa seperti Belanda dan Jerman (Rasyidah, 2013). Menurut Silitonga (2013) negara Indonesia menganut sistem yang diturunkan dari jajahan Belanda yakni sistem *two-tier*. Menurut Tricker & Tricker (2009) sistem *two-tier* yang struktur kepeimpinannya dibagi menjadi dua yaitu dewan pengawas dan dewan pelaksana. Lain halnya peran dewan pengawas dan dewan pelaksana dalam sistem *one-tier* dijadikan satu yang disebut *board of directors*. Dengan adanya perbedaan pemakaian sistem *corporate governance* ini, tidak menutup kemungkinan penelitian yang dilakukan di Inggris dapat memiliki hasil penelitian yang berbeda jika penelitian dilakukan di Indonesia. Penelitian ini masih perlu diteliti di Indonesia karena perbedaan sistem yang dianut berbeda pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terkait manajemen laba lebih banyak bersifat umum yang diukur dari diskresioner akrual (seperti pada penelitian Arifin & Dectriana, 2016; Indriastuti, 2012; Prabowo, 2014) sedangkan penelitian ini lebih mengerucut pada salah satu bentuk manajemen laba yaitu *income maximization* (pendapatan prematur) yang menggunakan diskresioner pendapatan sebagai tolak ukurnya. Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan penelitian ini ialah apakah ada pengaruh antara *corporate governance* dengan pengakuan pendapatan prematur.

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel dari enam variabel yang digunakan dalam penelitian Okaily, Dixon, & Salama (2018) yaitu jumlah *non-executive director*, jumlah *board of directors*, keahlian keuangan komite audit, dan jumlah pertemuan komite audit sebagai proksi *corporate governance*. Variabel jumlah komite audit dan tugas antara dewan komisaris & dewan direksi tidak dipisah tidak dipakai pada penelitian ini. Kedua variabel ini tidak sesuai dengan penelitian di negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pengaruh antara tata kelola perusahaan dengan pengakuan pendapatan prematur. Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan, pemerintah dan para pembuat standar akuntansi keuangan untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai rekomendasi dalam membuat standar tata kelola baru agar dapat membatasi tindakan-tindakan manajemen laba yang merugikan sebelah pihak.

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dewan Direksi dan Pengakuan Pendapatan Prematur

Dewan direksi merupakan anggota dewan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan perusahaan. Dalam hasil penelitian Okaily, Dixon, & Salama (2018) yang menunjukkan jumlah *board of director* berpengaruh positif terhadap *premature revenue recognition* atau *premature revenue recognition*. Dengan sistem *Corporate Governance* yang berbeda antara di Inggris dan di Indonesia, BOD di Inggris terdiri dari direktur eksekutif (pelaksana) dan direktur non eksekutif (pengawas). Indonesia memiliki anggota dewan yang khusus sebagai pelaksana saja, yaitu dewan direksi. Penelitian tersebut memakai jumlah dewan direksi dalam tolak ukurnya. Jumlah dewan direksi yang lebih rendah akan membuat komunikasi yang efektif dalam proses pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Jumlah dewan yang sedikit akan berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan yang akan mengindikasikan *premature revenue recognition* yang lebih sedikit. Penelitian ini memakai hipotesis sebagai berikut:
H₁: Jumlah dewan direksi mempengaruhi pengakuan pendapatan prematur secara positif.

Dewan Komisaris dan Pengakuan Pendapatan Prematur

Dewan Komisaris ialah anggota dewan yang bertugas sebagai pengawas dan pengesahan (ratifikasi) pada kebijakan dan pelaksanaan yang dilakukan direksi dalam mengoperasionalkan perusahaan (Antonia, 2008). Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan dewan komisaris bertujuan untuk menjaga efektifitas dari pengelolaan perusahaan agar selalu berjalan dengan baik dan juga menjaga agar terhindarnya konflik kepentingan antara pengelola dengan pemilik perusahaan.

Menurut Beasley (1996) dan Dechow *et al.* (1996) yang dikutip oleh Okaily, Dixon, & Salama (2018) menemukan bahwa keberadaan *non-executive director* efektif dalam membatasi penipuan

dalam pelaporan keuangan (*premature revenue recognition* yang lebih rendah). Lain hal dengan penelitian Okaily, Dixon, & Salama (2018) yang menunjukkan *non-executive director* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *pr-emature revenue recognition*. Dengan sistem *corporate governance* yang berbeda antara di Inggris dan di Indonesia, maka *non-executive director* dapat diartikan sebagai dewan komisaris karena *non-executive director* dan dewan komisaris memiliki tugas yang serupa. Penelitian ini memakai hipotesis sebagai berikut:

H₂: Jumlah dewan komisaris mempengaruhi pengakuan pendapatan prematur secara negatif signifikan.

Komite Audit dan pengakuan pendapatan prematur

Komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih oleh dewan komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keahlian keuangan anggota komite audit sangat penting di mana tugas komite audit sendiri merupakan penelaahan laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Semakin baik keahlian keuangan komite audit maka akan mengurangi tindakan kecurangan (*premature revenue recognition*). Penelitian Xie, Davidson III, & DaDalt (2003) mengatakan keahlian keuangan komite audit terhadap manajemen laba berpengaruh negatif signifikan. Dalam penelitian Okaily, Dixon, & Salama (2018) dengan hipotesis keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *premature revenue recognition*. Penelitian ini memakai hipotesis sebagai berikut:

H₃: Keahlian keuangan komite audit mempengaruhi pengakuan pendapatan prematur secara negatif signifikan.

Menurut POJK No 50/POJK.04/2015 pada pasal 13 menjelaskan pengadaaan rapat berkala komite audit paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Pertemuan komite audit yang diadakan semakin banyak akan mencerminkan kualitas pengawasan dalam laporan keuangan yang lebih baik, hal ini akan membatasi suatu kecurangan (*premature revenue recognition*) yang ada di laporan keuangan. Dalam penelitian Okaily, Dixon, & Salama (2019) dengan hipotesis jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *premature revenue recognition*. Penelitian ini memakai hipotesis sebagai berikut:

H₄: Jumlah pertemuan komite audit mempengaruhi pengakuan pendapatan prematur secara negatif signifikan.

2. DATA DAN METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Penelitian ini memiliki populasi perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 sampai 2018. Jenis data yang dipakai ialah data sekunder. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang didapat dari *website* Bursa Efek Indonesia atau *website* resmi perusahaan yang digunakan menjadi sampel penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan dipakai yaitu metode *purposive sampling* dengan ketentuan tertentu. Berdasarkan Tabel 1 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini sebanyak 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kurun waktu yang diambil pada tahun 2016 sampai 2018. Penyisihan perusahaan yang dijadikan sampel analisis ini lebih banyak tersisih pada perusahaan yang memiliki hasil *premature revenue recognition* yang negatif yakni sebanyak 56 perusahaan dari total 168 perusahaan manufaktur yang ada. Penyebaran sampel perusahaan menurut sektor industri di BEI yakni ada 15 perusahaan dikategori *Basic Industry and Chemicals*; 7 perusahaan dikategori *Consumer Goods Industry*; 15 perusahaan dikategori *Miscellaneous Industry*.

Penelitian ini menganalisis satu variabel dependen yakni, *premature revenue recognition* yang dipengaruhi oleh variabel independen yakni *corporate governance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Dalam mendeskripsikan tentang *premature revenue recognition* (PRR), peneliti mengadopsi model dari dari Stubben (2010) dengan memakai piutang tahunan sebagai fungsi linier dari perubahan pendapatan tiga kuartal pertama dan perubahan pendapatan kuartal keempat. Model penelitian untuk menentukan *discretionary revenue* yang sebagai proksi PRR (Okaily, Dixon, & Salama, 2019) sebagai berikut:

$$\Delta AR_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 \Delta R1_3_{i,t} + \beta_2 \Delta R4_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana: $\Delta AR_{i,t}$ = perubahan tahunan dari piutang perusahaan i pada tahun t ; $\Delta R1_3_{i,t}$ = perubahan pendapatan dari kuartal satu sampai kuartal tiga; $\Delta R4_{i,t}$ = perubahan pendapatan pada kuartal empat.

Dalam mendeskripsikan *corporate governance*, dapat dilihat dari beberapa organ yang ada

pada perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi (H_1) yang ada pada satu perusahaan. Dewan komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris (H_2) yang ada pada satu perusahaan. Komite audit dilihat dari kualitas keuangan

komite audit (H_3) yang diukur dengan persentase adanya keahlian keuangan yang dicantumkan pada profil komite audit di laporan tahunan; jumlah pertemuan komite audit (H_4) yang diukur dengan berapa banyak pertemuan komite audit diadakan pada satu tahun.

Tabel 1. Deskripsi Sampel

Panel A: Prosedur Pemilihan Sampel				
	2016	2017	2018	Total Sampel
Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX sampai Maret 2019	168	168	168	504
Perusahaan yang terdaftar di IDX sesudah tahun berakhir 2016 dan masih terdaftar sampai awal tahun 2019	-25	-25	-25	-75
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap di IDX maupun di <i>website</i> perusahaan	-47	-47	-47	-141
Perusahaan yang tidak memiliki data yang sesuai dengan kebutuhan variabel	-3	-3	-3	-9
Perusahaan yang memiliki hasil PRR yang negatif	-56	-56	-56	-168
Total perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian	37	37	37	111
Panel B: Distribusi perusahaan menurut sektor manufaktur				
Sektor Industri menurut IDX	2016	2017	2018	Total Sampel
<i>Basic Industry and Chemicals</i>	15	15	15	45
<i>Consumer Goods Industry</i>	7	7	7	21
<i>Miscellaneous Industry</i>	15	15	15	45
Total perusahaan	37	37	37	111

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2017,2018,2019 dan data diolah, 2019

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran
<i>Premature Revenue Recognition</i> (PRR)	Diukur dengan menggunakan hasil residual dari regresi antara selisih pendapatan triwulan pertama sampai ketiga ($R1_3$) dan selisih pendapatan ketiga sampai keempat ($R3_4$) terhadap piutang usaha (AR). Seluruhnya dibagi dengan total aset pada perodenya. Hasil residual regresi dengan nilai positif akan dijadikan dasar nilai PRR.
Jumlah Anggota Dewan Direksi (JADD)	Diukur dari jumlah anggota dewan direksi pada satu tahun.
Jumlah Anggota Dewan Komisaris (JADK)	Diukur dari jumlah anggota dewan komisaris pada satu tahun.
Keahlian Keuangan Komite Audit (KKKA)	Setiap anggota komite audit diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, 0 = tidak ada keahlian keuangan, 1 = merupakan lulusan sarjana di bidang ekonomi atau memiliki sertifikasi dibidang keuangan. Hasil kategori dijumlah seluruhnya pada satu perusahaan dalam satu tahun dan dibagi dengan jumlah komite audit pada perusahaan tersebut.
Jumlah Pertemuan Komite Audit (JPKA)	Diukur dari jumlah pertemuan komite audit pada satu tahun yang didapatkan dari laporan tahunan perusahaan.
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Diukur dengan logaritma total aset.
<i>Leverage</i> (DER)	Diukur dari perhitungan total hutang dibagi total ekuitas.
Profitabilitas (ROA)	Diukur dari perhitungan laba bersih operasional dibagi total aset.

Operasionalisasi variable disajikan pada tabel 2. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya variabel lainnya yang memperlihatkan manajemen laba (Damayanti Manurung & Istianingsih, 2017; Katmon & Farooque, 2015; Okaily, Dixon, & Salama, 2018),

maka dari itu ada tiga variabel kontrol yang ikut diteliti. Ukuran perusahaan memakai total aset sebagai tolak ukur karena semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan menandakan perusahaan itu tergolong perusahaan besar (Sembiring, 2012). Total hutang perusahaan (*leverage*) yang tinggi dapat memicu tindakan manajemen laba agar terhindar dari pelanggaran dari perjanjian utang

kepada pihak lain (Halim, Meiden, & Tobing, 2005; dan Yulistyawati, Suardikha, & Sudana, 2019). *Leverage* dapat dihitung dari total hutang dibagi dengan total aset. Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas operasional yang cukup rumit sehingga menambah kemungkinan dalam melakukan manajemen laba (Halim et al., 2005). Menurut Damayanti Manurung & Istianingsih (2017) kemampuan perusahaan dalam memperoleh labanya dapat dilihat dari profitabilitasnya. Profitabilitas didapatkan dari perhitungan rasio *return on assets* (ROA) yang dihitung dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Teknik analisis data digunakan regresi linier berganda data panel, sebagai berikut:

$$PRR = \beta_0 + \beta_1 JADD + \beta_2 JADK + \beta_3 KKKA + \beta_4 JPKA + \beta_5 SIZE + \beta_6 DER + \beta_7 ROA + \varepsilon$$

Dimana: PRR= *premature revenue recognition* atau pengakuan pendapatan prematur; JADD= Jumlah anggota dewan direksi; JADK= Jumlah anggota dewan komisaris; KKKA= Keahlian keuangan komite audit; JPKA= Jumlah pertemuan komite audit; SIZE=Ukuran Perusahaan; DER= *Debt to Equity Ratio (Leverage)*; ROA= *Return on Assets* (Profitabilitas); ε = eror

3. HASIL

Berdasarkan Tabel 3 statistik deskriptif, nilai pengakuan pendapatan prematur (PRR) berada kisaran angka dibawah 1 dengan rata-rata sebesar 0,075. Variabel JADD memiliki rata-rata 5,414 yang artinya banyak anggota dewan direksi berjumlah 5-6 orang. Variabel JADK memiliki rata-rata 4,532 yang artinya banyak anggota dewan komisaris berjumlah 4-5 orang. Variabel KKKA memiliki rata-rata 0,846 yang artinya dari anggota komite audit pada satu perusahaan 84,6 persen memiliki keahlian keuangan. Variabel JPKA memiliki rata-rata 5,081 yang artinya perusahaan memiliki sekitar 5 kali pertemuan komite audit dalam setahun. Variabel SIZE diproksi dari total aset dalam satuan jutaan memiliki rata-rata Rp 16.880.785 dalam satu tahun. Variabel *leverage* yang diproksi dengan *debt to*

equity ratio (DER) yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban (hutang) memiliki rata-rata 14,867. Profitabilitas yang diproksi dengan *return on assets* (ROA) yang merupakan tingkat pengembalian terhadap aset memiliki rata-rata 0,025.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan *Histogram Normality Test*, menunjukkan probabilitas lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,078318, sehingga data dapat dikatakan terdistribusi normal. Hasil pengujian multikolinieritas memperlihatkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antara variabel-variabel yang diteliti yang ditandai dengan hubungan antara variabel lain lebih dari -0,9 dan kurang dari 0,9 (Tabel 4). Hasil pengujian autokolerasi dengan menggunakan uji Serial Korelasi *Breusch Godfrey LM Test* menunjukkan nilai *p value t parsial* lebih besar dari 0,05 atau *probability f-statistic* sebesar 0,386940 lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat serial korelasi, sehingga tidak terjadi autokorelasi (tabel 5).

Analisis uji *Chow*, uji *Hausman*, uji *Lagrange Multiplier* (LM) dan diputuskan *Common Effect* sebagai model yang tepat dengan perhitungan *General Least Square (Cross Section Weight* dengan koefisien estimasi *White Cross Section*). Dengan menggunakan *White Cross Section* ini membuat model analisis menjadi kebal terhadap pelanggaran asumsi heterokedastisitas dan uji ketergantungan antar *cross sectional* (Reed & Ye, 2011).

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Std. Deviasi
PRR	0,075	0,003	0,272	0,041
JADD	5,414	2,000	11,000	2,440
JADK	4,532	2,000	12,000	2,136
KKKA	0,846	0,333	1,000	0,193
JPKA	5,081	2,000	13,000	2,344
SIZE	16.880,8	139,8	345.000.	51.345,800
DER	14,867	11,848	19,658	1,729
ROA	0,025	-0,392	0,716	0,106

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel	PRR	JADD	JADK	JPKA	KKKA	SIZE	LEV	ROA
PRR	1	-0,12379	-0,01355	-0,08414	-0,17809	-0,06887	-0,01597	-0,01649
JADD	-0,12379	1	0,747662	0,359677	-0,07713	-0,07552	0,686252	0,036696
JADK	-0,01355	0,747662	1	0,160227	-0,04409	0,00496	0,600089	-0,01962
JPKA	-0,08414	0,359677	0,160227	1	-0,05579	-0,05042	0,222871	-0,01439
KKKA	-0,17809	-0,07713	-0,04409	-0,05579	1	0,128241	0,005993	-0,03562
SIZE	-0,06887	-0,07552	0,00496	-0,05042	0,128241	1	0,024675	-0,20051
LEV	-0,01597	0,686252	0,600089	0,222871	0,005993	0,024675	1	0,053798
ROA	-0,01649	0,036696	-0,01962	-0,01439	-0,03562	-0,20051	0,053798	1

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Variabel	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	-0,184230	0,092066	-2,001063	0,0555
RES2(-2)	0,141254	0,321136	0,439859	0,6635
RES2(-1)	0,418981	0,264577	1,583590	0,1249
JADD	-0,012559	0,006182	-2,031359	0,0522
JADK	0,007305	0,006048	1,207808	0,2376
JPKA	0,007161	0,003756	1,906254	0,0673
KKKA	0,009627	0,041647	0,231153	0,8189
SIZE	0,002412	0,005483	0,439850	0,6635
DER	0,010696	0,006690	1,598788	0,1215
ROA	0,042665	0,100803	0,423246	0,6755

Tabel 6. Uji Regresi dan Uji Determinasi Koefisien

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0,105077	9,672434	0
JADD	-0,00275	-2,525915	0,0131
JADK	0,001123	0,825699	0,4109
KKKA	-0,047742	-3,696338	0,0004
JPKA	-0,000663	-2,518017	0,0133
Ca SIZE	0,001473	1,313169	0,1920
DER	-0,001861	-3,599007	0,0005
ROA	-0,038545	-2,758341	0,0069
Weighted Statistics			
R-squared		0,177247	
Adjusted R-squared		0,121331	

Berdasarkan Tabel 6 uji Determinasi Koefisien pada penelitian ini, nilai *R-Squared* yang mengartikan bahwa 17,7247 persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dan sisanya sebesar 82,2753 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang diteliti ini. Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel Jumlah anggota dewan direksi (JADD), Keahlian keuangan komite audit (KKKA), Jumlah pertemuan komite audit (JPKA), *Debt to Equity Ratio* (DER); dan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan prematur (PRR). Sedangkan Jumlah anggota dewan komisaris (JADK), Ukuran Perusahaan (Ca Size) tidak berpengaruh terhadap *premature revenue recognition* (PRR).

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan jumlah anggota dewan direksi mempunyai pengaruh negative terhadap pengakuan pendapatan prematur. Penelitian ini tidak sesuai dengan Okaily *et al.* (2018) yang menyatakan jumlah de-

wan direksi yang lebih sedikit akan menciptakan komunikasi yang efektif dalam proses pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Dewan direksi yang semakin sedikit dalam pengambilan keputusan hanya dibuat oleh salah satu orang saja yang dapat menyebabkan manajemen dengan mudahnya melakukan manajemen laba sesuai dengan kepentingan manajemen.

Hasil analisis menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap pengakuan pendapatan prematur. Hal ini menunjukkan tidak baiknya fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris terhadap manajemen. Sehingga ada kemungkinan manajemen melakukan pengakuan pendapatan prematur yang tidak bisa dikendalikan dengan jumlah dewan komisaris yang semakin banyak. Penambahan ataupun pengurangan jumlah anggota dewan komisaris dimungkinkan hanya sebagai pemenuhan terkait peraturan yang dikeluarkan OJK saja sehingga tidak mempengaruhi kinerja dari dewan komisaris itu sendiri. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian (Antonia, 2008; Indriastuti, 2012) yang menyimpulkan tidak ada pengaruh (negatif tidak signifikan) antara

dewan komisaris dengan manajemen laba

Hasil analisis menunjukkan keahlian keuangan komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap pengakuan pendapatan prematur. Anggota komite audit yang memiliki keahlian memadai dibidang keuangan sangat membantu dalam pengawasan kegiatan keuangan yang ada diperusahaan. Keahlian keuangan yang tinggi membuat pengawasan dan pemeriksaan keuangan dikerjakan lebih mendetail dan terperinci. Hal ini dapat membuat pihak manajemen enggan untuk melakukan pengakuan pendapatan prematur dan membuat nilai pengakuan pendapatan prematur semakin menurun. Hasil ini sejalan dengan penelitian Okaily *et al.* (2018) yang menemukan keahlian komite audit berhubungan negatif terhadap pengakuan pendapatan prematur.

Hasil analisis menunjukkan jumlah pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap pengakuan pendapatan prematur. Pertemuan audit yang semakin banyak membuat komite audit banyak melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara lebih mendetail hal ini dapat mengurangi tindakan pengakuan pendapatan prematur yang akan dilakukan manajemen. Kemungkinan pengakuan pendapatan prematur akan semakin rendah dengan lebih banyaknya pertemuan komite audit yang dilaksanakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Okaily *et al.* (2018) yang menemukan jumlah komite audit berhubungan negatif dengan pengakuan pendapatan prematur.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jumlah anggota dewan direksi, jumlah pertemuan komite audit, keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap pengakuan pendapatan prematur dan jumlah anggota dewan komisaris yang tidak berpegaruh terhadap pengakuan pendapatan prematur. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian (Antonia, 2008; Indriastuti, 2012) yang menyimpulkan tidak ada pengaruh (negatif tidak signifikan) antara dewan komisaris dengan manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Okaily *et al.* (2018) yang menemukan keahlian keuangan komite audit dan jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif terhadap PRR. Dari hasil menunjukkan bahwa jumlah pertemuan komite audit perlu diperbanyak, pemerintah perlu memberikan batas minimal pertemuan komite audit

yang lebih dari 4 kali dalam setahun pada setiap perusahaan. Bagi perusahaan dapat merekrut seluruh anggota komite audit dengan memiliki keahlian keuangan. Tugas komite audit yang lebih banyak berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan memerlukan tenaga yang ahli dibidang keuangan agar menambah kualitas pengawasan yang akan mengurangi kemungkinan adanya manajemen laba.

Ada beberapa keterbatasan dipenelitian ini. Penggunaan *discretionary revenue* sebagai proyeksi pengakuan pendapatan prematur hanya dapat digunakan pada perusahaan non keuangan saja karena perusahaan sektor keuangan memiliki perhitungan yang berbeda terkait akun pendapatan dan piutang yang akan digunakan pada perumusan pengakuan pendapatan prematur. Hasil penelitian tidak bisa dipergunakan untuk semua perusahaan sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat memakai sampel perusahaan non keuangan selain sektor manufaktur. Penelitian selanjutnya dapat menambah jangkauan tahun yang lebih lebar dengan lebih dari satu sektor ataupun dapat menggunakan sektor manufaktur saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonia, E. (2008). *Analisis pengaruh reputasi auditor, proporsi dewan komisaris independen, leverage, kepemilikan manajerial dan proporsi komite audit independen terhadap manajemen laba*. Universitas Diponegoro.
- Arifin, L., & Dectriana, N. (2016). Pengaruh Firm Size, Corporate Governance, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 1-93.
- Antonia, E. (2008). *Analisis pengaruh reputasi auditor, proporsi dewan komisaris independen, leverage, kepemilikan manajerial dan proporsi komite audit independen terhadap manajemen laba*. Universitas Diponegoro.
- Arifin, L., & Dectriana, N. (2016). Pengaruh Firm Size, Corporate Governance, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 1-93.
- Berger, A. N., Clarke, G. R. G., Cull, R., Udell, G. F., Klapper, L., & Udell, G. F. (2005). Corporate governance and bank performance: A joint analysis of the static, selection, and dynamic effects of domestic, foreign, and state ownership. *Journal of*

- Banking and Finance*, 29(8-9 SPEC. ISS.), 2179-2221.
<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.03.013>
- Bidabad, B., & Allahyarifard, M. (2019). Assets and Liabilities Management in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 3(2), 32-43. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v3i2.272>
- Chou, T. K., & Buchdadi, A. D. (2018). Executive's compensation, good corporate governance, ownership structure, and firm performance: A study of listed banks in Indonesia. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(3), 79-91. <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v12is03/art-07>
- Damayanti Manurung, V., & Istianingsih. (2017). Pengaruh good corporate governance dan kualitas audit terhadap real earning management (studi lintas negara ASEAN). *Profita*, 10(2), 293-326.
- Durnev, A., & Mangen, C. (2009). Corporate investments: Learning from restatements. *Journal of Accounting Research*, 47(3), 679-720.
- Erawati, T., & Wahyuni, F. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia(Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 129-137. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.895>
- Faisal. (2003). Kimia Farma lakukan kesalahan pencatatan laporan keuangan.
- Gnawali, A. (2018). Corporate Governance and Its Impact on Financial Performance in Nepalese Commercial Banks. *International Journal of Modern Research in Engineering & Management*, 1(7), 41-51.
- Halim, J., Meiden, C., & Tobing, R. L. (2005). Pengaruh manajemen laba pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam indeks LQ-45. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, (September), 15-16.
- Haryanto, S. (2013). *Kebijakan struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan dan gpci terhadap ekspektasi investor*.
- Indriastuti, M. (2012). Analisis kualitas auditor dan corporate governance terhadap manajemen laba. *Eksistensi*, IV(2), 532.
- Kamal, M. E. M., Salleh, M. F. M., & Ahmad, A. (2016). Detecting financial statement fraud by Malaysian public listed companies: The reliability of the Beneish M-Score model. *Jurnal Pengurusan*, 46, 23-32. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2016-46-03>
- Katmon, N., & Farooque, O. Al. (2015). Exploring the impact of internal corporate governance on the relation between disclosure quality and earnings management in the UK listed companies. *Journal of Business Ethics*, 142(2), 345-367.
- Lestari, E., & Murtanto, M. (2018). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(2), 97. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i2.2063>
- Lisandri, & Hayati, N. (2018). Corporate Governance Terhadap Corporate Financial Performance Melalui Earning Management Sebagai Pemediasi. *SPREAD*, 8(2), 91-103.
- Maulida, H. (2019). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1-15.
- Mendlowitz, E. (2017). Expectation Gap. *Managing Your Tax Season*, (1), 273-277. <https://doi.org/10.1002/9781119449287.ch20>
- Mohd Saleh, N., Mohd Iskandar, T., & Mohid Rahmat, M. (2007). Audit committee characteristics and earnings management: Evidence from Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 15(2), 147-163.
- Muda, I., Maulana, W., Siregar, H. S., & Indra, N. (2018). The analysis of effects of good corporate governance on earnings management in Indonesia with panel data approach. *Iranian Economic Review*, 22(2), 599-625. <https://doi.org/10.22059/ier.2018.66169>
- Nabila, A., & Daljono. (2013). Pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan reputasi auditor terhadap manajemen laba. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(1), 1-10.
- Okaily, J. Al, Dixon, R., & Salama, A. (2018). Corporate governance quality and premature revenue recognition: Evidence from the UK. *International Journal of Managerial Finance*, IJMF-02-2018-0047.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Nomor 55 Tentang Pembentukan dan Pedoman*

- Pelaksanaan Kerja Komite Audit.*
- Prabowo, D. A. (2014). Pengaruh komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah pertemuan komite audit terhadap manajemen laba (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010–2012). *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 90–99.
- Putri, E. L., Haryanto, S., & Firdaus, R. M. (2018). Mampukah Good Corporate Governance dan Risiko Kredit Sebagai Prediktor Financial Distress? *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/10.26905/afr.v1i1.2291>
- Rasyidah, R. (2013). Perbandingan corporate governance dengan sistem one-tier board di Inggris dan AS terkait efektifitas pencegahan terjadinya fraud dalam korporasi. *Global & Policy*, 1(1), 11–18.
- Reed, W. R., & Ye, H. (2011). Which panel data estimator should I use? *Applied Economics*, 43(8), 985–1000.
- Sakib, I. A. (2019). Detection of Earnings Manipulation Practices in Bangladesh. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 6(8), 616–631.
- Scott, W. R. (2014). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson Education.
- Sembiring, H. (2012). Analisis Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mediasi*, 4(1), 68–77.
- Silitonga, K. (2013). We believe in corporate governance.
- Stubben, S. R. (2010). Discretionary revenues as a measure of earnings management working paper. *The Accounting Review*, 85(2), 695–717.
- Sulistyanto, S. (2008). *Manajemen Laba (Teori & Model Empiris)*. Jakarta: Grasindo.
- Sun, L., & Rath, S. (2009). An Empirical Analysis of Earnings in Australia. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 31.
- Tessema, A. (2019). The impact of corporate governance and political connections on information asymmetry: International evidence from banks in the Gulf Cooperation Council member countries. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 35, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.05.001>
- Tricker, R. I., & Tricker, B. (2009). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 129–138.
- Wijaya, R. Z., Rohman, A., & Zulaikha. (2018). The effect of good corporate governance on financial performance and net working capital turnover as a mediation variable: evidence from Indonesia Stock Exchange (IDX). *Journal of Business & Retail Management Research*, 13(01), 70–81. <https://doi.org/10.24052/jbrmr/v13is01/art-07>
- Xie, B., Davidson III, W. N., & DaDalt, P. J. (2003). Observations of deviance. *Journal of Corporate Finance*, 9, 295–316.
- Yang, W. S. H. I., Chun, L. O. O. S. I. N., & Ramadili, M. (2009). *The Effect of Board Structure and Institutional Ownership Structure on Earnings Management Earnings Management with Board Structure*. 3(2), 332–353.
- Yulistyawati, N. K. A., Suardikha, I. M. S., & Sudana, I. P. (2019). The analysis of the factor that causes fraudulent financial reporting with fraud diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art1>